

IMPLEMENTASI STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG DALAM PENGEMBANGAN WISATA ALAM DI TAMAN WISATA ALAM KLAMONO, PROVINSI PAPUA BARAT

Oleh:

Yohanes Yoseph Rahawarin¹, Reinardus Liborius Cabuy², Anton Silas Sinery³
^{1,2,3}Fakultas Kehutanan Universitas Papua Manokwari

E-mail : jo.rahawarin@gmail.com

ABTRAK

Kabupaten Sorong banyak menyimpan sumber daya alam yang mempunyai kelebihan untuk dijadikan suatu obyek wisata alam, seperti Taman Wisata Alam Klamono (TWAK). Namun dalam pembangunan wisata alam memunculkan berbagai tantangan dan kendala, sehingga perlu dilakukan upaya pengembangan wisata alam dengan serius dan strategi yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 strategi yang diterapkan pemerintah Kabupaten Sorong, yaitu meningkatkan sumber daya finansial, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, meningkatkan peran para stakeholder untuk membangun kerjasama yang sinergis dan bermanfaat, serta meningkatkan kemampuan masyarakat lokal untuk meningkatkan daya tarik wisata alam sesuai potensi TWAK. Beberapa faktor kendala yang mempengaruhi implementasi strategi dalam mengembangkan wisata alam di TWAK, yaitu ketersediaan anggaran daerah yang belum memadai, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang masih rendah, sarana dan prasarana wisata alam yang belum memadai, kondisi sosial masyarakat yang masih mempermasalahkan hak ulayat, serta kerjasama yang kurang maksimal antar para stakeholder.

Kata Kunci: Implementasi Strategi, Pemerintah Daerah, Wisata Alam, TWAK, Kabupaten Sorong

A. PENDAHULUAN

Alam menyediakan kelimpahan sumberdaya yang memikat banyak pelaku dengan aneka kepentingan yang kerap berseberangan (Tadjudin, 2000). Upaya melestarikan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Salah satu cara terpenting untuk dapat menjamin agar sumberdaya alam dapat dilestarikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan umat manusia sekarang dan di masa yang akan datang

adalah dengan penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi.

Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang multifungsi dalam menunjang kehidupan umat manusia, tidak hanya terbatas sebagai tempat konservasi keanekaragaman hayati dan pemeliharaan fungsi ekosistem, tetapi juga menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat (Rahawarin, 2010). Amanat Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan bahwa masyarakat selain mempunyai hak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan, memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai

dengan peraturan yang berlaku, tetapi juga berkewajiban ikut serta dalam menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan (Pangesti, 2005).

Peningkatan fungsi kawasan hutan Taman Wisata Alam Klamono (TWAK) sebagai obyek wisata yang memiliki daya tarik wisata alam, menjadi sumber pendapatan bukan saja bagi masyarakat tetapi juga bagi pemerintah daerah Kabupaten Sorong. Dengan demikian diharapkan kawasan konservasi ini dapat memenuhi fungsinya untuk (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan, (2) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta (3) pemanfaatan secara lestari sehingga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, wisata alam dan peran serta masyarakat (PP Nomor 28 Tahun 2011). MacKinnon et al., (1990) menjelaskan bahwa konsep pelestarian modern adalah pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya bumi secara bijaksana, bukan hanya sekedar melindungi yang menutup peluang untuk pemanfaatan.

Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomis, sosial dan budaya. Namun jika pengembangannya tidak dipersiapkan dan tidak dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan banyak permasalahan yang menyulitkan atau bahkan merugikan masyarakat. Untuk menjamin supaya pariwisata dapat berkembang secara baik dan berkelanjutan serta mendatangkan manfaat bagi manusia dan meminimalisasi dampak negatif yang mungkin timbul, maka pengembangan pariwisata perlu didahului dengan kajian yang mendalam, yakni dengan melakukan penelitian

terhadap semua sumber daya pendukungnya (Wardiyanta, 2010).

Kabupaten Sorong memiliki Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sesuai UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu Taman Wisata Alam Klamono (TWAK). Hutan TWAK seluas 1.909,37 hektar dengan tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah, memiliki potensi keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, meliputi keragaman hayati dan non hayati serta memiliki bentuk bentang alam menarik untuk dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Potensi TWAK yang demikian menjadikan kawasan ini berpeluang dikembangkan sebagai obyek dan daya tarik wisata alam untuk kegiatan seperti mengamati burung (*bird watching*), jalur pengamatan (*jungle tracking*) dan pemancingan (*fishing*). Di lain pihak keberadaan TWAK yang mudah diakses membuat kawasan ini menjadi terancam karena seringkali terjadi aktivitas pembalakan liar dan perambahan kawasan oleh masyarakat. Permasalahan lainnya dalam pengembangan pariwisata alam daerah khususnya di TWAK antara lain: (1) Amenitas (infrastruktur penunjang) yang belum lengkap; (2) Sarana dan prasarana yang terdapat di TWAK masih belum lengkap; dan (3) Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana wisata terkendala oleh hak ulayat masyarakat adat setempat (Kurey, dkk., 2019 dan Woersok, dkk., 2020).

Kawasan TWAK termasuk dalam wilayah administrasi pemerintah Distrik Klamono, Kabupaten Sorong. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten sorong 2017-2022 adalah Maju Bersama, Rakyat Cerdas, Sehat dan Sejahtera, dengan misi pembangunan antara lain: 1) Membangun infrastruktur dasar dan

infrastruktur ekonomi pedesaan dan perkotaan; 2) Mengembangkan SDM yang cerdas dan sehat yang memiliki daya saing tinggi; 3) Mengembangkan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; 4) Menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat secara berkelanjutan; 5) Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, professional dan akuntabel berorientasi pelayanan publik yang prima. Visi dan misi ini menunjukkan bahwa rencana strategi pembangunan Kabupaten Sorong diarahkan kepada peningkatan taraf hidup masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di sekitar kawasan TWAK.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sorong tahun 2017, maka pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022. Dengan demikian pemerintah daerah memiliki kepentingan terhadap kawasan TWAK dalam upaya kelestarian sistem penyangga kehidupan, kesejahteraan masyarakat serta pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan TWAK, memberikan bantuan sarana produksi kehutanan dan pertanian kepada masyarakat, program rehabilitasi hutan dan lahan, pembangunan sarana dan prasarana umum, dan perumahan sosial. Namun sejauh ini pemerintah daerah Kabupaten Sorong belum menetapkan langkah-langkah strategi yang harus diimplementasikan sebagai kebijakan dalam mendukung pengelolaan TWAK. Dengan demikian yang menjadi permasalahannya dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi implementasi

kebijakan yang harus dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sorong dalam mendukung pengembangan TWAK sebagai salah satu daerah tujuan wisata. Atas dasar uraian di atas, maka perlu dilakukan kajian mengenai implementasi strategi pemerintah daerah Kabupaten Sorong dalam pengembangan wisata alam di Taman Wisata Alam Klamono (TWAK), Provinsi Papua Barat.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Strategi

Suryono (2004) mengatakan bahwa pengertian strategi pada prinsipnya selalu berkaitan dengan tiga hal utama yaitu, tujuan, sasaran dan cara. Sedangkan Bintoro (1982) mengartikan strategi sebagai keseluruhan langkah-langkah (kebijaksanaan) dengan perhitungan yang pasti, guna mencapai suatu tujuan untuk mengatasi suatu permasalahan, dimana dalam strategi itu terdapat metode dan teknik. Setiap perumusan strategi memerlukan adanya keterkaitan antara strategi dengan isu-isu strategis, karena pada dasarnya strategi dikembangkan untuk mengatasi isu strategis yang berkembang. Isu strategis adalah pilihan kebijakan pokok yang mempengaruhi mandat, misi, nilai organisasi, tingkat dan perpaduan produk atau jasa, pemakai, biaya, dan keuangan (Bryson, 2007).

2. Implementasi Strategi

Implementasi adalah rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dari strategi (Higgins *dalam* Salusu, 1996). Secara umum pengertian implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strateginya dalam bentuk program, prosedur dan anggaran atau pengembangan strategi dalam bentuk

tindakan. Eddy (2016) mengatakan bahwa implementasi strategi, diantaranya mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi. Menurut Van Meter dan Van Horn *dalam* Mahsyar, (2017) ada 6 (enam) faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi: a) Standar dan sasaran kebijakan; b) Sumber daya, c) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; d) Karakteristik agen pelaksana; e) Kondisi sosial, ekonomi dan politik; dan f) Disposisi implementor

3. Wisata Alam

Dalam Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Dijelaskan pula wisatawan adalah orang yang melakukan wisata, sedangkan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Wisata alam dengan istilah *ecotourism* diterjemahkan menjadi ekowisata yaitu jenis pariwisata yang berwawasan lingkungan. Maksudnya melalui aktivitas yang berkaitan dengan alam, wisatawan diajak melihat alam dari dekat, menikmati keaslian alam dan lingkungannya sehingga membuatnya tergugah untuk mencintai alam. Semuanya

ini sering disebut dengan istilah *back to nature* (Yoeti, 2000). Wisatawan mengunjungi atraksi dan obyek wisata alam adalah berkaitan dengan keingintahuan, pendidikan, kesenangan dan penelitian tentang sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan sekitar.

Wisata alam dapat diartikan sebagai suatu bentuk rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan ekosistemnya, baik asli maupun setelah adanya perpaduan dengan daya cipta manusia. Hal tersebut biasa dilihat dari klasifikasi jenis obyek dan daya tarik dimana wisata alam memiliki persentase yang paling tinggi. Di Indonesia motivasi kunjungan wisatawan baik asing maupun domestik sebagian besar adalah karena sumberdaya alam (Fandeli, 1995). Obyek wisata alam adalah alam beserta ekosistemnya, baik asli maupun setelah adanya perpaduan dengan daya cipta manusia, yang mempunyai daya tarik untuk diperlihatkan dan dikunjungi wisatawan. Pada prinsipnya obyek wisata alam adalah obyek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan sumber daya alam dan tata lingkungan (Fandeli, 1995). Obyek wisata alam terdiri atas: a) Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna; b) Obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan sejarah, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan (Lakoni, 1995).

4. Pengembangan Pariwisata

Menurut pendapat Musanef (1995), pengembangan pariwisata adalah segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana prasarana, barang dan jasa fasilitas yang diperlukan, guna melayani

kebutuhan wisatawan. Menurut Terdapat 5 aspek yang perlu mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata (Yoeti, 1996) yaitu: a) Wisatawan (*Tourist*); b) Pengangkutan (*Transportations*); c) Atraksi/ Objek wisata (*Attractions*); d) Fasilitas Pelayanan (*Services Facilities*); dan e) Informasi dan promosi (*Information and Promotion*)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sudjarwo (2001), metode deskriptif kualitatif adalah metode yang dilakukan guna mendapatkan gambaran yang benar tentang suatu objek. Fokus dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yang meliputi: (1) Strategi pemerintah daerah dalam pengembangan TWAK sebagai obyek dan daya Tarik wisata; (2) Implementasi strategi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sorong; serta (3) Faktor kendal yang mempengaruhi implementasi strategi pemerintah Kabupaten Sorong.

Responden penelitian yang dipilih dari pemerintah daerah Kabupaten Sorong dan masyarakat. Responden pemerintah daerah adalah staff yang membidangi atau memiliki bidang tugas yang berkaitan dengan wilayah kerja di kawasan TWAK yang berasal dari organisasi perangkat daerah: a) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; b) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; c) Dinas Lingkungan Hidup; d) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung; e) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan f) Kepala Distrik Klamono. Sedangkan responden dari masyarakat adalah Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat di Distrik Klamono.

Sumber data dalam penelitian berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alat dan bahan sebagai instrumen penelitian ini meliputi panduan dokumentasi, panduan wawancara, serta media atau perangkat penunjang. Data yang telah dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014). Analisis data terdiri dari 4 (empat) alur kegiatan yaitu: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mengingat data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, maka uji validitas data yang dilakukan lebih ditekankan pada uji coba validitas data kualitatif. Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Tujuan dari penggunaan analisis data model interaktif tersebut adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsi secara sistematis, faktual dan akurat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Wisata Alam

Sesuai arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Sorong kawasan TWAK termasuk dalam rencana pola ruang kawasan lindung daratan. Kawasan ini memiliki sumber daya alam dan budaya masyarakat yang potensial untuk mewujudkan kabupaten Sorong sebagai destinasi wisata alam. Hal ini sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPDA) Provinsi Papua Barat 2007 – 2016 bahwa produk unggulan Provinsi Papua Barat adalah upacara adat dan tradisi lainnya serta taman nasional/taman wisata.

Proses perumusan strategi diawali dengan memformulasikan visi berdasarkan arah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sorong, isu-isu atau kondisi yang berkembang di tengah masyarakat dan kondisi organisasi, serta antisipasi terhadap kemungkinan perkembangan di masa yang akan datang. Mengidentifikasi isu-isu strategis merupakan tahap awal dalam merumuskan suatu kebijakan dan merupakan inti dalam proses perencanaan strategis. Setiap perumusan strategi memerlukan adanya keterkaitan antara strategi dengan isu-isu strategis, karena pada dasarnya strategi dikembangkan untuk mengatasi isu strategis yang berkembang.

Menurut Bryson (2007) isu strategis merupakan pilihan kebijakan pokok yang mempengaruhi mandat, misi, nilai organisasi, tingkat dan perpaduan produk atau jasa, pemakai, biaya, dan keuangan. Adapun isu-isu yang menjadi skala prioritas bagi pengembangan wisata alam di Kabupaten Sorong yaitu:

- a) Masih minimnya anggaran dan sumber daya manusia yang profesional,
- b) Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang wisata alam,
- c) Masih rendahnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan TWAK
- d) Masih rendahnya program pengelolaan berdasarkan potensi sumber daya alam TWAK,

Strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani antara organisasi dengan lingkungannya. Strategi biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, dan menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok. Musanef (1995) mengatakan bahwa pengembangan pariwisata adalah segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi

untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana prasarana, barang dan jasa fasilitas yang diperlukan guna melayani kebutuhan wisatawan. Adapun strategi yang diterapkan pemerintah Kabupaten Sorong dalam pengembangan pariwisata alam di TWAK adalah:

- a) Mengoptimalkan dukungan para pihak (stakeholders), baik pemerintah (Pusat dan Provinsi) dan perguruan tinggi, LSM dan masyarakat melalui manajemen kolaborasi dalam program perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan potensi kawasan TWAK.
- b) Mengoptimalkan berbagai upaya penguatan dan perluasan jaringan kerjasama serta meningkatkan kemitraan pariwisata alam di kawasan TWAK dengan masyarakat lokal dan stakeholders lain yang sinergis dan bermanfaat.
- c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata di kawasan TWAK yang mempunyai daya saing tinggi atau kompetitif serta berkelanjutan.

2. Implementasi Strategi Pemerintah Daerah

Implementasi strategi adalah sekumpulan aktivitas dan pilihan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana strategis. Inti dari definisi ini adalah adanya tindakan untuk melaksanakan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya. Implementasi strategi merupakan bagian kunci (*key part*) dari keseluruhan manajemen strategi (Wheelen dan Hunger, 2004).

Implementasi strategi pengembangan wisata alam di TWAK yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Sorong,

membutuhkan dukungan sumber daya, baik secara kelembagaan, sarana dan prasarana, maupun finansial. Pertama bahwa secara organisasi sudah terdapat struktur kelembagaan pemerintah daerah kabupaten Sorong telah menetapkan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga sebagai organisasi perangkat daerah yang mengurus bidang pariwisata (Perda Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016). Namun belum ada standard operasi sistem (SOP) yang khusus mengatur atau mengurus obyek-obyek wisata termasuk TWAK. Sejauh ini masih berpedoman pada tugas pokok dan fungsi organisasi. Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah maupun pihak di luar pemerintah daerah belum optimal dalam upaya membangun kerjasama sehingga dapat dilakukan terobosan dalam pengelolaan obyek wisata. Keadaan ini disebabkan belum ada tenaga kerja profesional di bidang pariwisata. Kedua, Sarana dan prasarana yang dimiliki instansi teknis terkait seperti Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Dinas Lingkungan Hidup ataupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sorong belum cukup mendukung untuk penyelenggaraan urusan wisata alam, baik secara internal maupun eksternal. Ketiga, dukungan finansial untuk urusan pariwisata belum memadai untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam.

Bentuk pelaksanaan atau implementasi dari strategi pemerintah daerah untuk mewujudkan Kabupaten Sorong sebagai daerah tujuan wisata alam adalah dengan menetapkan program-program strategis yang menunjang pengembangan pariwisata alam di TWAK adalah:

1. Strategi meningkatkan sumber daya finansial, sarana dan

2. Strategi meningkatkan kerjasama dengan para stakeholder untuk membangun kerjasama yang sinergis dan bermanfaat.
3. Strategi meningkatkan kemampuan masyarakat lokal untuk meningkatkan daya tarik atau atraksi wisata alam dan atraksi budaya sesuai potensi kawasan TWAK secara berkelanjutan

Beberapa program yang telah dilaksanakan pemerintah daerah menunjukkan bahwa strategi yang ditetapkan belum diarahkan secara khusus sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam mewujudkan wisata alam di kawasan TWAK. Perhatian pemerintah daerah lebih mengarah ke peningkatan pendapatan dan ekonomi keluarga antara lain seperti pemberian bantuan tanaman pangan dan hortikultura, bantuan ternak peliharaan seperti sapi dan kambing, bantuan tanaman jangka panjang baik tanaman buah-buahan maupun tanaman kehutanan, bantuan sarana produksi pertanian dan peternakan. Namun peningkatan sarana prasarana wisata alam, penguatan kelembagaan yang tertuju untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang wisata alam belum mendapat perhatian.

Keberhasilan suatu program tidak dapat dinilai seketika saat program tersebut telah dilaksanakan, namun dibutuhkan waktu untuk mengukur sejauh mana sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai untuk mewujudkan wisata alam di kawasan TWAK. Hal ini dapat dilihat dengan belum memadainya sarana dan prasarana pendukung, dukung finansial dan sumber daya manusia yang profesional

serta penguatan kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan potensi kawasan TWAK. Diperlukan keterlibatan dan peran serta masyarakat lokal dalam pengembangan wisata alam melalui pembentukan kelompok sadar wisata.

3. Faktor Kendala yang Mempengaruhi Implementasi Strategi Pemerintah Daerah

Terdapat beberapa faktor kendala yang mempengaruhi implementasi strategi pemerintah daerah kabupaten Sorong dalam mewujudkan wisata alam di kawasan TWAK yaitu:

1. Ketersediaan anggaran daerah yang belum memadai untuk melaksanakan program dan kegiatan di kawasan TWAK.
2. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata dibidang wisata alam yang masih rendah
3. Ketersediaan sarana dan prasarana wisata alam di kawasan TWAK yang belum memadai, terutama fasilitas penunjang obyek wisata serta fasilitas umum lainnya.
4. Kondisi sosial masyarakat sekitar kawasan TWAK yang belum stabil, ditunjukkan dengan adanya masyarakat yang masih mempermasalahkan hak ulayat.
5. Kerjasama yang kurang maksimal antar stakeholders baik pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat untuk mengajak investor yang mau menanamkan usahanya di kawasan TWAK.

E. KESIMPULAN

Terdapat 3 (tiga) strategi yang diterapkan pemerintah daerah Kabupaten Sorong untuk mewujudkan pariwisata berbasis masyarakat di TWAK adalah strategi meningkatkan sumber daya finansial, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang profesional, strategi meningkatkan kerjasama dengan para stakeholder untuk membangun kerjasama yang sinergis dan bermanfaat, serta strategi meningkatkan kemampuan masyarakat lokal untuk meningkatkan daya Tarik atau atraksi wisata alam dan atraksi budaya sesuai potensi kawasan TWAK secara berkelanjutan.

Implementasi strategi pemerintah daerah Kabupaten Sorong dalam mengembangkan wisata alam di TWAK belum dapat dikatakan berhasil. Kondisi ini disebabkan terdapat beberapa faktor kendala yang mempengaruhi implentasi dari strategi dalam mewujudkan wisata alam di kawasan TWAK, yaitu: a) Ketersediaan anggaran daerah yang memadai untuk melaksanakan program dan kegiatan; b) Sumber daya manusia atau aparatur yang dimiliki Pemerintah daerah yang kurang professional dari segi kuantitas maupun kualitas; c) Ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata alam di kawasan TWAK yang belum memadai, terutama fasilitas penunjang obyek wisata serta fasilitas umum lainnya; d) Kondisi sosial masyarakat sekitar kawasan TWAK yang belum stabil, ditunjukkan dengan adanya masyarakat yang masih mempermasalahkan hak ulayat; serta e) Kerjasama yang kurang maksimal antar stakeholders baik pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat untuk mengajak investor yang mau menanamkan usahanya di kawasan TWAK.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryson, J. M. (2007). *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Eddy, Y. (2016). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta. Andi
- Fandeli, C. (1995). *Potensi Obyek Wisata Alam*. Dalam Chafid Fandeli (Ed) *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberty
- Kurey, A.J., Y.Y. Rahawarin, dan D.M.H. Renwarin. (2019). *Potensi jasa lingkungan pada kawasan taman wisata alam Klamono, kabupaten sorong*. *Jurnal Kehutanan Papuaasia* 5 (2): 124–133 (2019)
- Lakoni, M. (1995). *Jenis Pengusahaan Wisata Alam*. Dalam Chafid Fandeli (Ed) *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberty
- Mackinnon, J., K. Mackinnon, G. Child dan J. Thorsell. (1990). *Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi di Daerah Tropika*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Mahsyar, A. (2017). *Model Partnership Governance Dalam Penerapan Community* (Issue February 2016).
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta. UI-Press.
- Musanef. (1995). *Pariwisata dan Pengembangannya*. Jakarta. Gunung Agung.
- Pangesti, T. (2005). *Wisata alam. Materi Pelatihan Konservasi Sumber Daya Hayati*. Bogor. Balai Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Kawasan Suka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*
- Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 Tentang *Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong*
- Rahawarin, Y.Y. (2010). *Forest land use by the community in Sorong Natural Tourism Park at Sorong City, West Papua Province*. *Biodiversitas*, Vol 11 (4): 222-227.
- Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Papua Barat 2007 – 2016
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sorong Tahun 2017-2022
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sorong Tahun 2017.
- Salusu, J. (1996) *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sudjarwo, H. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung. Mandar Maju.
- Suryono. (2004). *Pengantar Teori Pembangunan*. Universitas Negeri Malang, Malang. UM Press.
- Tadjudin, D. (2000). *Manajemen kolaborasi*. Bogor. Pustaka Latin.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang *Kehutanan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisata*
- Wardiyanta. (2010). *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta. Andi.

- Wheelen, T.L., dan J. D. Hunger. (2004). Strategic Management and Business Policy. New Jersey: Ninth Edition. Prentice Hall.
- Woersok, P.V., J. Manusawai dan A. Sinery. (2019). Kajian Kelayakan Potensi Dan Strategi Pengembangan Ekowisata Di Taman Wisata Alam Klamono. Median Volume 11 Nomor 3 Bulan Oktober 2019.
- Yoeti, H.O.A. (1996) Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung. Angkasa.
- Yoeti, H.O.A, (2000). Ekowisata: Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup. Pertja. Jakarta.